

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA DAN REFORMASI DI INDONESIA

oleh Siswanto

LC

Pendahuluan

Dalam studi hubungan internasional masih sedikit pengamat yang menggunakan kebudayaan sebagai pendekatan untuk memahami fenomena internasional. Umumnya mereka masih berpegang pada pendekatan Realis, Idealis, dan Ilmiah. Pendekatan Realis memandang fenomena internasional sebagai arena perjuangan untuk mempertahankan dan mencapai kekuasaan (Hans J. Morgenthau : 1962), pendekatan Idealis memandang fenomena internasional suatu pendekatan yang berkaitan dengan aturan, etika, dan hukum internasional, dan pendekatan Ilmiah memandang fenomena internasional sebagai fenomena yang didekati melalui prinsip-prinsip ilmiah, dan memanfaatkan metode statistik.

Tanpa mengurangi keyakinan terhadap akurasi semua pendekatan diatas, perlu disadari pula bahwa kebudayaan masyarakat di sebuah negara memiliki korelasi dengan perilaku negara tersebut di forum internasional. Pada dasarnya Hubungan Internasional juga merupakan interaksi berbagai sistem kebudayaan (Iriye : 1979). Setiap negara punya orientasi sendiri-sendiri sehingga terkadang perbedaan orientasi ini menimbulkan konflik diantara berbagai negara. Akibat perbedaan orientasi yang tidak terkendali akan mengancam perdamaian di suatu kawasan. Perbedaan orientasi masing-masing negara disebabkan adanya perbedaan latar belakang, khususnya latar belakang kebudayaan. Umumnya setiap Negara punya tradisi, orientasi sosial, intelektual dan tatanan politik masing-masing (Iriye : 1979).

Latar belakang kebudayaan merupakan aspek penting untuk memahami interaksi antar negara. Kebudayaan disini termasuk didalam-

nya tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dari suatu negara, dengan demikian pada dasarnya kebudayaan merupakan suatu kerangka acuan suatu masyarakat dalam melihat dunia sekitarnya (Spradley : 1975).

Kebudayaan menjadi faktor penentu sikap suatu negara terhadap negara lain. Nilai-nilai, kebiasaan, dan persepsi suatu masyarakat merupakan aspek yang mempengaruhi respon negara tersebut terhadap fenomena internasional, maupun perilaku negara lain.

Suatu negara memberi interpretasi dalam hubungan internasional berdasarkan pengalaman, persepsi, dan sistem pemikiran yang dianut oleh masyarakatnya, khususnya sistem pemikiran yang dianut oleh pengambil keputusan di negara tersebut.

Pemahaman terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam suatu negara sangat membantu untuk memahami perilaku negara tersebut di forum internasional. Pemahaman ini akan mendorong untuk mengetahui lebih lanjut kecenderungan perilaku suatu negara. Pemahaman ini juga akan memberi penjelasan karakter nasional dari negara tersebut. Pola kebudayaan yang dianut suatu masyarakat dari suatu negara menentukan pola kebijakan luar negeri negara tersebut. Nilai-nilai masyarakatnya akan mempengaruhi watak negara tersebut dalam pergaulan internasional (Iriye:1979).

Dapat dikatakan nilai-nilai yang dianut masyarakat memiliki korelasi dengan kebijakan luar negerinya. Hal ini disebabkan bahwa kebudayaan masyarakat merupakan sumber domestik dari kebijakan luar negeri (Kegley & Wittkopf : 1987). Perilaku suatu negara dalam hubungan internasional adalah cermin dari nilai-nilai domestik masyarakatnya.

Keyakinan politik para elit politik atau para pengambil keputusan merupakan aspek dominan atas kebijakan luar negeri suatu negara. Karena bagaimanapun juga para pengambil keputusan tersebut adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan luar negeri.

Keberadaan dari kasus yang melibatkan hubungan antar negara banyak ditentukan oleh pandangan atau keyakinan para pengambil keputusan di suatu negara terhadap kasus yang sedang dihadapinya. Dengan demikian perundingan atau negosiasi sebenarnya pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencari titik temu dari pandangan-pandangan yang bertentangan diantara para pengambil keputusan.

Pandangan individu atau masyarakat terhadap fenomena internasional ditentukan oleh imagenya terhadap fenomena tersebut. Sifat image itu sendiri dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya, pengalaman pribadi, image juga dipandang mengontrol kesadaran individu.

Image yang dimiliki individu memiliki pautan dengan lingkungannya. Image merupakan produk dari interaksi individu dengan lingkungannya (Coplin :1980). Salah satu lingkungan yang memberi pengaruh terhadap individu adalah lingkungan keluarga. Image keluarga terhadap suatu fenomena akan ditiru oleh individu yang ada didalam keluarga tersebut. Image keluarga tersebut selanjutnya diwarisi menjadi image individu.

Selanjutnya lingkungan masyarakat juga ikut membentuk image individu terhadap suatu fenomena. Image masyarakat disekitar individu tersebut merupakan model yang ditiru oleh individu tersebut. Image masyarakat terhadap suatu fenomena juga akan tercermin dalam image individu tersebut.

Image individu terhadap suatu fenomena juga disebabkan oleh pengalaman pribadi yang dialaminya (Coplin : 1980). Image individu terhadap suatu fenomena juga ditentukan oleh sejarah hidupnya, atau perjalanan hidup individu tersebut. Peristiwa-peristiwa tertentu yang berbekas dalam pengalaman pribadinya akan menjadi pangkal tolak persepsi individu terhadap suatu fenomena yang memiliki relevansi dengan peristiwa-peristiwa tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa image akan mengarahkan persepsi, pemikiran, dan keyakinan individu atau masyarakat terhadap suatu fenomena, dan image akan mengontrol respon individu atau masyarakat terhadap suatu fenomena yang dihadapinya.

Demikian halnya pandangan masyarakat Amerika tentang fenomena internasional yang diekspresikan dalam kebijakan luar negerinya, tidak terlepas dari imagenya tentang fenomena internasional tersebut. Salah satu image Amerika yang perlu mendapat perhatian adalah tentang nilai persamaan. Sehingga kebijakan luar negeri Amerika pada dasarnya merupakan upaya penyebaran nilai persamaan. Amerika juga menyampaikan persamaan kepada Indonesia, dengan harapan agar persamaan tersebut akan menjadi acuan arah reformasi di Indonesia.

Kebijakan luar negeri

Kebudayaan Amerika memiliki arti penting dalam menguak tabir kebijakan luar negeri Amerika. Untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika, perlu terlebih dahulu dipahami kebudayaan Amerika (Iriye:1979). Kebijakan luar negeri Amerika mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang didefinisikan sebagai identitas Amerika. Kebijakan Luar negeri Amerika pada hakekatnya mendorong perluasan nilai-nilai Amerika ke luar negeri (Huntington : 1981).

Perluasan nilai-nilai Amerika tersebut disebabkan adanya suatu keyakinan yang kuat didalam alam pemikiran masyarakat Amerika, bahwa masyarakat Amerika khususnya etnis *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) merupakan masyarakat pilihan (*Chosen people*). Keyakinan ini ditanamkan oleh John Winthrop seorang pendeta yang memimpin rombongan imigran Inggris ke Amerika, Winthrop berkotbah diatas kapal yang membawa imigran tersebut dan isinya upaya membangkitkan semangat (*moral*) pengikutnya dengan meyakinkan bahwa mereka merupakan masyarakat pilihan.

"We shall find that the God of Israel is among us, our when ten of us shall be able to resist a thousand of enemies, when he shall make us a praise and glory, that men shall say of succeeding plantations: the lord make it lake of New England for me must consider that me shall be as city upon a hill, the eyes of all pleople are upon us." (Dunn: 1962)

Khotbah Winthrop tentang masyarakat pilihan demikian diyakini oleh mereka. Sehingga konsep tentang masyarakat pilihan menjadi image tentang dirinya. Karena yakinnya mereka atas image tersebut tersebut, maka perpindahan mereka dari Inggris Amerika ke juga diyakini sebagai perjalanan suci (*pilgrim*).

Perjalanan suci yang mereka lakukan tidak terlepas dari adanya konflik antara kaum Puritan (Protestan) dengan gereja Anglikan (Katholik) di Inggris. Kaum Puritan memandang gereja Anglikan telah menyimpang dari ajaran yang murni. Dilain pihak gereja Anglikan menilai kaum Puritan merupakan separatisme dalam umat Kristen yang harus ditumpas, sehingga perang antara sekte tersebut tidak dapat dihindari.

Konsekuensi dari perang tersebut kaum Puritan dengan persetujuan Raja Inggris berimigrasi ke Amerika, dan mendirikan masyarakat baru yang disebut New England. Perpindahan mereka dari Inggris ke

Amerika sebagai upaya menghindari konflik yang berkepanjangan dengan gereja Anglikan. Perjalanan suci mereka dari Inggris ke Amerika merupakan perjalanan untuk membangun tatanan masyarakat Puritan di dunia baru (Amerika). Dengan harapan di dunia baru mereka akan betul-betul dapat melaksanakan ajaran Puritan.

Kemudian image tentang masyarakat pilihan juga mendorong keyakinan bahwa, New England merupakan penjelmaan dari New Canaan. Mereka mengacu kepada pernyataan didalam kitab Injil, yang menginformasikan adanya Canaan atau tanah Palestina, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat nabi Musa setelah terusir dari Mesir.

Kaum Puritan meyakini Tuhan telah berpihak kepada dirinya dengan memberi New England sebagai tempat bermukim. " New England adalah tempat tinggal yang dijanjikan Tuhan untuk mereka "(Dunn:1962). Di tempat baru mereka dapat mengembangkan masyarakat baru, sistem sosial baru, dan tatanan pemerintahan baru yang didasarkan kepada nilai-nilai Puritan. Kaum Puritan memandang kepindahan mereka ke Amerika merupakan takdir Tuhan. Seperti ungkapan Withrop bahwa Tuhan telah memanggil kaum pilihannya untuk memasuki kehidupan baru, dan menjadikan kebaikan sebagai bagian dari keluarga dan lingkungannya (Dunn:1962). Kaum Puritan mendapat anugerah dari Tuhan dengan memperoleh tanah yang subur dan luas di kawasan Amerika utara.

Image tentang masyarakat pilihan juga mendorong munculnya sebuah keyakinan bahwa, mereka ditakdirkan untuk memimpin dunia. Masyarakat Amerika memandang mitos tentang city upon a hill yang ada didalam khotbah Winthrop merupakan alat untuk membawa masyarakat kepada dunia baru (Huntington :1981). Upaya Kaum Puritan Amerika membawa masyarakat kepada dunia baru tidak hanya berlaku untuk masyarakat Amerika, tetapi juga untuk masyarakat di luar Amerika.

Keberadaan Amerika menjadi pemimpin dunia berkaitan dengan nilai-nilai Puritan antara lain: kerja keras, hemat, siap bersaing, dan egaliter. Nilai-nilai puritan ini ternyata telah mendorong masyarakat Amerika kepada keberhasilan dibidang ekonomi, maupun politik. Selain dari itu nilai-nilai Puritan juga mendorong masyarakat Amerika melakukan inovasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga negara ini menjadi negara terkemuka dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keberadaan Amerika menjadi pemimpin dunia juga ditopang

oleh kekayaan alam Amerika. Seperti diketahui Amerika kaya dengan sumber mineral, minyak bumi, Amerika juga memiliki tanah yang luas dan subur, sehingga berkembanglah daerah pertanian dan peternakan.

Akumulasi dari sumber daya manusia dan sumber daya alam menyebabkan Amerika menjadi negara terbesar semenjak bangsa ini berdiri. Bahkan negara ini mendapat julukan sebagai negara Adidaya (Super power), karena keunggulan negara ini dibidang ekonomi, teknologi, militer, dan politiknya. Keunggulan-keunggulan negara tersebut mendorong negara ini menjadi negara paling berpengaruh di dunia, dan konsekuensinya negara ini menjadi pemimpin dunia.

Konsekuensi menjadi pemimpin dunia maka Amerika juga menjadi polisi dunia. Dalam hal ini, Amerika bertanggungjawab terhadap keamanan di dunia. Terjadinya suatu gejolak di suatu kawasan akan mendorong Amerika bertindak menyelesaikan masalah tersebut, hal ini bisa dilihat keterlibatan Amerika pada konflik kawasan Balkan, Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara. Amerika juga menetralsisir negara atau pihak yang dipandang dapat mengancam keamanan internasional, seperti embargo Amerika terhadap Irak, dan Libia.

Selain dari itu sebagai pemimpin dunia dan negara adidaya Amerika juga menjadi pusat peradaban atau kebudayaan di dunia. Banyak mahasiswa dari berbagai penjuru dunia menimba ilmu di Amerika, untuk mempelajari berbagai bidang keahlian. Banyak kebudayaan populer Amerika ditiru oleh masyarakat di negara lain. Kebudayaan populer termasuk didalamnya aliran musik, tarian, olah raga, mode pakaian, produk makanan dan minuman. Banyak misionari Amerika yang dikirim ke berbagai penjuru di dunia, untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Sebagai pusat peradaban Amerika merasa bertanggungjawab untuk membina peradaban masyarakat di wilayah lain. Dalam hal ini Amerika terpanggil untuk menyebarkan nilai-nilai Amerika, termasuk didalamnya nilai persamaan, yang merupakan nilai dasar yang membentuk karakter sosial masyarakat Amerika (Irish :1965).

Persamaan

Image masyarakat Amerika tentang dirinya sebagai masyarakat pilihan mendorong mereka berjuang menegakan persamaan ke luar Amerika. Dalam sejarah diplomasi Amerika tercatat bahwa nilai per-

samaan pertama kali disebarkan Amerika adalah ke Cina melalui nota diplomatik yang dikenal dengan *Open Door Policy*, tahun 1899 dan 1900 (Paterson: 1989). Nilai persamaan dipandang akan memberi rasa adil, nilai persamaan juga dipandang relevan dengan masyarakat heterogen, dan nilai persamaan dipandang memiliki sifat universal.

Persamaan dipandang memberi keadilan didalam suatu masyarakat. Persamaan tidak mutlak untuk seluruh tatanan sosial, bagaimanapun perbedaan tetap diakui, namun persamaan memberi kesempatan kepada semua orang untuk mencapai tujuan (Kaplan :1959). Perbedaan dalam tatanan sosial berdasarkan peran, dan tanggungjawab individu yang berbeda didalam masyarakat.

Persamaan memberi kesempatan kepada semua orang untuk berprestasi. Semua orang punya hak yang sama untuk mewujudkan keinginan atau harapannya, asalkan mampu memenuhi syarat-syarat yang objektif dan logis. Di sini yang dipertimbangkan adalah kemampuan individu dalam menunjukkan kualifikasinya, bahwa dirinya memang pantas mencapai keinginan atau harapannya. Dalam situasi demikian semua anggota masyarakat didorong bersikap objektif dalam mencapai cita-citanya.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi persamaan setiap individu punya peluang untuk mencapai sukses dalam hidupnya. Tidak mengherankan masyarakat yang demikian kehidupan lebih banyak terdapat catatan sukses baik dibidang sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi.

Persamaan juga dinilai memotivasi individu untuk berprestasi se-tinggi-tingginya. Pada dasarnya individu mendambakan dirinya untuk berprestasi. Pada taraf tertentu prestasi merupakan suatu kebutuhan bagi individu, sehingga individu berjuang untuk mencapai prestasi tersebut. Individu yang berprestasi akan memperoleh pengakuan dari masyarakat, individu tersebut akan memperoleh kehormatan dari masyarakat, masyarakat akan menghargai prestasi tersebut, sehingga hal ini akan meningkatkan harga diri individu tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Persamaan juga memotivasi individu untuk bersaing satu sama lain. Seperti diketahui individu cenderung terlibat dalam persaingan, mereka memiliki naluri untuk saling menaklukan. Persaingan disini atau kompetisi didasarkan pada aturan main yang adil. Dalam persaingan tiap individu mendambakan kemenangan, karena kemenangan akan memberi

kehormatan bagi individu tersebut, dan individu yang kalah akan menerima kekalahan tersebut dengan kesatria dan sportif. Persamaan akan membiasakan individu berjiwa besar, baik sebagai pemenang maupun sebagai yang kalah, karena mereka sama-sama memiliki peluang untuk menang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sebaliknya baik yang menang maupun yang kalah merasa diperlakukan dengan adil.

Persamaan relevan dengan masyarakat yang heterogen, masyarakat heterogen yang terdiri banyak suku, aliran, ras dan agama dapat membuka peluang diskriminasi. Persamaan memandang bahwa diskriminasi sosial merupakan suatu yang berbahaya (Brock :1970). Persamaan menolak bentuk-bentuk diskriminasi baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Persamaan menolak adanya dominasi oleh kelompok yang kuat. Persamaan memberi tempat yang sama bagi semua unsur masyarakat.

Persamaan menetralkan ancaman disintegrasi yang biasanya mengancam masyarakat heterogen, masyarakat heterogen sangat potensial munculnya perpecahan, karena adanya beragam unsur masyarakat. Persamaan memberi rasa adil kepada semua unsur masyarakat, mereka mendapat perlakuan sama dengan unsur masyarakat lain. Persamaan akan menghindari munculnya kecemburuan sosial, diantara unsur masyarakat. Persamaan sebaliknya akan membina rasa kebersamaan diantara unsur masyarakat yang ada, yaitu: suku, agama, ras, dan aliran.

Pandangan masyarakat Amerika tentang persamaan bersifat universal. Persamaan mereka harap berlaku dimana saja. Persamaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, persamaan dipandang menembus batas kebudayaan dari suatu masyarakat. Amerika berpandangan bahwa persamaan tidak hanya untuk ditegakan di Amerika, tetapi juga perlu ditegakan di wilayah lain.

Dalam pandangan masyarakat Amerika persamaan di antara manusia sudah menjadi takdir Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, justru sebaliknya harus dipelihara dan sebar luaskan. Perhatian yang besar masyarakat Amerika terhadap persamaan mendorong negara ini mencantumkan persamaan kedalam *Declaration of Independence*, yang secara eksplisit menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan sama. Persamaan juga dicantumkan di dalam *Amandment* ke 14, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga Amerika memperoleh perlindungan hukum yang sama

(Brock:1970). Persamaan tercantum dalam dasar negara dan konstitusi Amerika, hal ini suatu indikasi persamaan memiliki arti sangat penting dalam kehidupan masyarakat Amerika.

Karena persamaan bersifat universal dan merupakan taksir Tuhan, maka masyarakat Amerika sebagai masyarakat pilihan bertanggungjawab untuk mengkampanyekannya. Amerika berupaya mengkampanyekan persamaan ke negara lain, khususnya ke negara berkembang. Amerika melihat justru di negara berkembang persamaan belum dapat berkembang, karena masih dominannya nilai-nilai feodal. Sebagian orang menyebutnya feodalisme baru, yakni masyarakat yang hidup di abad 20 (modern), tetapi pola pemikirannya masih terbelenggu oleh tata nilai feodalisme.

Feodalisme di negara berkembang mendorong munculnya Cronism, yaitu pola hubungan formal tetapi didasarkan pada pertalian persahabatan, keluarga, kedaerahan. Cronism merupakan ancaman terhadap persamaan, karena tidak memberi kesempatan kepada individu yang bukan Crony nya untuk mencapai suatu tujuan, dan sebaliknya memberi kesempatan anggota crony nya untuk mencapai tujuan walaupun mengabaikan aturan yang ada.

Cronism mengabaikan objektivitas dan sebaliknya mengembangkan subjektivitas. Konsekuensinya hubungan individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tidak memperhatikan aturan yang ada. Pertimbangan aturan dapat dikalahkan oleh pertimbangan Crony. Sudah dapat dibayangkan masyarakat yang dihinggapi Cronism, pola hubungan antar individu tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena mencampur-adukan antara aspek pribadi dengan aspek kedinasan. Masyarakat yang demikian sudah pasti bergerak menuju kehancuran, karena mengabaikan rasionalitas.

Reformasi

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah memasuki era reformasi, yaitu suatu era pembaruan yang menolak adanya Cronism yang mendasari munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Reformasi telah menelan enam pahlawan reformasi ditandai dengan tertembaknya enam mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 di halaman kampusnya (Sinar Pagi : 1998), usai melakukan protes terhadap

pemerintah. Mereka menuntut dikikisnya Cronism yang melahirkan KKN, dan sebaliknya mereka menghendaki ditegakannya persamaan dalam hukum maupun politik.

Sebagai masyarakat pilihan Amerika berkepentingan memberi masukan terhadap perkembangan reformasi di Indonesia. Amerika memiliki image bahwa persamaan hukum di Indonesia masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu Amerika mendesak ditegakannya persamaan hukum di Indonesia melalui Menteri Pertahanannya William S. Cohen yang mengadakan kunjungan ke Indonesia pada bulan Juli 1998 (*Kompas* 1998). Indonesia belum melaksanakan persamaan hukum sepenuhnya walaupun hal tersebut sudah diamanatkan oleh ayat 1, pasal 27, Undang-undang Dasar 45, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama dihadapan hukum.

William S. Cohen dalam kunjungannya ke Indonesia mendiskusikan korban penculikan dengan Menteri pertahanan Indonesia, Jenderal Wiranto. Cohen meminta kepada pemerintah Indonesia agar masalah penculikan diselesaikan melalui jalur hukum, dan pelakunya diusut sesuai dengan hukum yang berlaku (*Kompas* : 1998). Cohen disini mendesak ditegakannya azas persamaan hukum dalam kasus penculikan. Walaupun pelaku penculikan adalah prajurit Komando pasukan Khusus, yang selama ini disegani oleh masyarakat, karena merupakan pasukan elit Angkatan Darat yang dinilai paling bergengsi. Namun hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut Cohen mengharapkan proses peradilan terhadap pelaku penculikan dapat berjalan adil, jujur dan terbuka (*Kompas* : 1998).

Nampaknya Cohen meragukan rasa keadilan para penegak hukum di Indonesia. Karena selama ini di Indonesia dikenal adanya mafia peradilan. Mafia peradilan ini pada hakekatnya merupakan kolusi antara para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Kolusi yang menghebohkan masyarakat adalah dibongkarnya kasus *Gandhi Memorial School* di Mahkamah agung oleh hakim agung Handoyo, yang menyatakan adanya kolusi di Mahkamah agung dalam kasus di atas, tetapi hal tersebut disangkal oleh Mahkamah agung saat itu, dan mengatakan bahwa yang terjadi bukan kolusi tetapi kesalahan prosedur, yang berarti dalam kasus tersebut hanya terjadi kesalahan administrasi, yang diinterpretasikan terjadi karena tidak disengaja. Sehingga tidak ada pengusutan terhadap kasus tersebut. Kolusi atau kondisi semacam di atas

merupakan ancaman terhadap tegaknya azas persamaan hukum di Indonesia.

Kekhawatiran Cohen terhadap dunia peradilan di Indonesia juga dikarenakan lemahnya kedudukan hakim di Indonesia. Seperti diketahui hakim di Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan demikian nasib hakim di Indonesia berada ditangan Presiden. Selanjutnya para hakim di Indonesia adalah aparat pemerintah, sehingga muncul suatu pertanyaan apakah para hakim mampu bersikap adil seandainya ada kasus yang melibatkan kepentingan pemerintah? Apakah mungkin pemerintah tidak intervensi untuk melindungi kepentingannya dengan menekan para hakim tersebut? maka tidak mengherankan jika ada kasus yang melibatkan kepentingan pemerintah menimbulkan ketidakpuasan dimasyarakat. Misalnya kasus pencabutan izin terbit majalah Tempo, yang melibatkan Departemen Penerangan dan dengan majalah Tempo pada tingkat kasasi akhirnya dimenangkan oleh Departemen Penerangan. Kemudian tuntutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Syarwan Hamid dan Faisal Tanjung, karena keduanya dianggap bertanggungjawab pada peristiwa penyerbuan Kantor PDI di jalan Diponegoro, 27 Juli 1997, tidak dikabulkan oleh hakim walaupun keputusan hakim tersebut diambil setelah Pemerintahan Orde Reformasi. Selanjutnya tuntutan masyarakat agar pemerintah Orde Reformasi menyelesaikan secara hukum kasus Tanjung Priok, yaitu penembakan hingga tewas sejumlah jemaah masjid dibawah pimpinan Amir Biki oleh aparat keamanan belum mendapat tanggapan.

Nampaknya Orde Reformasi masih mewarisi budaya hukum Orde baru, yaitu Tradisi *The King never wrong*, Raja tidak pernah salah, karena raja mereka pandang mendapat kekuasaan dari Tuhan, jadi kebijakan raja mereka pandang kebijakan Tuhan. Konsekuensi dari pandangan tersebut maka pejabat tinggi di Indonesia sulit kena sangsi hukum, dan pengakatan kasus pejabat tinggi ke pengadilan dinilai akan mengurangi wibawa pemerintah, karena diduga akan melibatkan lebih banyak lagi pejabat yang terlibat. Misalnya saja kasus korupsi di Pertamina oleh Ibnu Sutowo, yang bersangkutan tidak memperoleh sangsi hukum yang berkaitan dengan korupsi, tetapi malah dikirim ke Swiss selama beberapa tahun, setelah rakyat mulai melupakan kasusnya, yang bersangkutan berani pulang ke Indonesia, dan menjabat ketua sebuah organisasi sosial. Budaya hukum dan pandangan diatas merupakan merupakan kcen-

derungan buruk terhadap perkembangan hukum, dan merupakan ancaman serius terhadap azas persamaan hukum di Indonesia.

Amerika sebagai masyarakat pilihan juga merasa memiliki tanggungjawab terhadap arah reformasi politik di Indonesia. Masyarakat Amerika memiliki image bahwa kualitas kehidupan politik di Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya persamaan politik di Indonesia. Kepedulian masyarakat Amerika tersebut dapat dilihat dari diselenggarakannya International Conference dengan tema *Towards Structural Reforms for Democratization in Indonesia: Problems and Prospects*, pada tanggal 12-14 Agustus 1998, di Jakarta. Konperensi ini merupakan kerjasama antara Ford Foundation dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam konperensi tersebut sejumlah pakar politik dari Amerika memberi masukan-masukan yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memberi arah perkembangan politik di Indonesia. Di antara pakar tersebut anatara lain, yaitu: Juan J. Linz dari Yale University, dan Richard Gunter dari Ohio State University.

Juan J.Linz & Alfred Stepan dalam makalahnya berjudul "*Some thoughts on Decentralization, Devolution and the Many varieties of Democratic Federal Arrangements*", memberi masukan bahwa sistem pemerintahan federasi perlu dikembangkan dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, dalam era komunikasi yang serba cepat pemerintah sentralistis tidak sesuai lagi, karena memerlukan biaya tinggi, dan tidak efisien. Kedua, negara yang masyarakatnya heterogen, penduduknya berbeda karakter, etnis, kebudayaan, agama, sejarah, tradisi dan kesejahteraan memerlukan perbedaan otonomi pengelolaan pemerintahannya.

Pandangan Linz yang kedua relevan harapan ditegakannya semangat persamaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, walaupun tidak mutlak sama, tetapi alokasi kekuasaan dengan perbandingan yang wajar sudah mencerminkan adanya semangat persamaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di Indonesia selama ini pemerintah pusat relatif dipandang terlalu kuat, sedangkan pemerintah daerah sebaliknya relatif dipandang terlalu lemah. Sebagai contoh pencalonan Gubernur yang lebih menentukan adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan menteri Dalam Negeri dibandingkan dengan rakyat setempat. Tidak mengherankan banyak kasus pemilihan pimpinan daerah mengundang protes dari rakyat setempat. Baru-baru ini pengangkatan Gubernur Jawa

Timur, dan pengangkatan Walikota Malang menimbulkan protes dari rakyat, karena yang diangkat menjadi Gubernur dan Walikota tersebut bukan calon yang diinginkan oleh rakyat setempat, walaupun rakyat setempat lebih berkepentingan dan lebih tahu pimpinan yang paling tepat untuk wilayahnya.

Kemudian pakar lain, Richard Gunter dalam makalahnya yang berjudul "*Presidential, Parliamentary, Semi-Presidential System: Opening a Dialogue on Institutional Choice in Indonesia*". Dalam makalahnya Gunter memperkenalkan sistem pemerintahan Semi Presidensial. Sistem ini merupakan kompromi antara Sistem Presidensial dan Sistem Parlementer. Seperti diketahui bahwa ciri dari Sistem presidensial adalah lebih dominannya kekuasaan pemerintah. Sedangkan Sistem Parlementer bercirikan lebih dominannya kekuasaan Parlemen. Dari Sistem Semi-Presidensial diharapkan muncul keseimbangan atau persamaan kekuasaan antara pemerintah dan parlemen. Sistem Semi-Presidensial dinilai sejalan dengan semangat persamaan.

Selama pemerintahan Orde baru maupun Orde Reformasi dipandang masih mencerminkan kuatnya kekuasaan pemerintah dibanding kekuasaan parlemen. Sebagai ilustrasi Parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki sejumlah hak jarang digunakan, seperti hak angket, hak budget dan lain-lain. Kemudian pembuatan rancangan undang-undang selalu datang dari pemerintah bukan dari Dewan Perwakilan Rakyat, padahal fungsi utama Dewan adalah merumuskan undang-undang. Bahkan pada era Orde Baru, anggota Dewan yang kritis terhadap pemerintah, maka membawa resiko dirinya akan di recall (Penggantian antar waktu) oleh partainya. Kebijakan pemerintah baik selama Orde Baru maupun Orde Reformasi tidak pernah ditolak atau dibatalkan oleh Dewan. Jika Sistem Semi-Presidensial diterapkan di Indonesia mungkin akan lebih memberdayakan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan hal ini dinilai sesuai dengan semangat reformasi yang sedang berkembang di Indonesia.

Penutup

Amerika memiliki kepedulian terhadap arah reformasi di Indonesia. Kiranya perlu diperhatikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan mengenai hukum dan politik dari masyarakat

Amerika, karena hal ini diharapkan akan ikut memberi arah kepada reformasi di Indonesia, yakni arah reformasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Karena selama ini Amerika dinilai sebagai pelopor demokrasi, dan hak-hak asasi, maka sudah dipastikan orientasi pemerintahnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

Konsekuensinya Pemerintah Indonesia sebaiknya bersikap terbuka atas masukan-masukan dari masyarakat Amerika. Terbuka dalam arti menerima masukan tersebut untuk ditampung, dipelajari dengan saksama, lalu dicoba dilaksanakan, disempurnakan(disesuaikan) dengan semangat reformasi, atau sebaliknya ditolak karena tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Penolakan terhadap masukan-masukan tersebut hendaknya didasarkan pada sikap kritis dan atau selektif. Penolakan tersebut juga dilandasi oleh suatu argumentasi, dan penalaran rasional, bukan penolakan irasional dengan berpura-pura dirinya yang paling benar dengan alasan bangsa Indonesia memiliki kebudayaan sendiri, penolakan irrasional merupakan tradisi egois Orde Baru yang sudah usang. Orde Reformasi sebaiknya berpegang pada prinsip bahwa kebenaran bukan mutlak milik kebudayaan Indonesia, jadi kebenaran yang datang dari kebudayaan masyarakat manapun jika dapat memperkaya kebenaran atau kebudayaan Indonesia silahkan diterima, hal ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang tidak pernah takut dengan kebenaran atau kebudayaan dari luar, tetapi justru berhasil berhasil melaksanakan alkulturasi.

Belajar dari pengalaman bangsa Amerika sebagai bangsa besar yang mendasarkan kehidupan sosialnya pada nilai persamaan, maka diusulkan agar nilai persamaan dijadikan dasar dari arah reformasi yang sedang berkembang di Indonesia, karena dipastikan akan berpihak kepada semua rakyat Indonesia. Usulan tersebut didasarkan pada suatu harapan masyarakat Indonesia dimasa depan adalah masyarakat Indonesia yang egaliter. Tatanan masyarakat egaliter tersebut sudah harus disiapkan sejak sekarang. Pembentukan masyarakat egaliter yang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa merupakan antitesis terhadap masyarakat Feodal yang berkembang pesat selama Orde baru. Tatanan Feodal tersebut telah mengantar masyarakat Indonesia menuju masyarakat tradisional yang bercirikan Crony, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Untuk membentuk masyarakat masa depan Indonesia yang bercirikan egaliter, rasional, dan modern, maka arah reformasi di Indonesia sekali lagi sebaiknya mengacu kepada nilai persamaan, yang telah dibuktikan di Amerika dan berhasil membawa masyarakat tersebut kearah masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Daftar Pustaka

Brock, Williams L, et.al. 1970. *The evolution of American Democracy*. New York. The Dial Press

Coplin, William D. 1980. *Introduction to International Politic*. New Jersey. Prentice Hall, Inc.

Dunn, Richard. 1962. *Puritan and Yankees: the Winthrop dynasty of New England 1630-1717*. New York. W.W. Norton & Company, Inc

Huntington, Samuel P. 1982. *American Politics: the Promise of Disharmony*. Massachusetts. The Belknap Press of Harvard University Press

Iriye, Akira . 1980. "Culture and Power: International Relations as intercultural Relations." In *American foreign policy*. Ed. John Ikenberry. Princetown. Harper Collins Publisher

Irish, Mariam D. 1965. *The Politics of American Democracy*. New Jersey. Prentice Hall, Inc

Morgenthau Hans J. 1962. *Politics among nations: the struggle for power and peace*. New York. Alfred A. Knopf

Paterson, Thomas G, 1989. *Major problems in American foreign policy* . Lexington. DC Heath and Company

Spradley, James. et.al.1975. The Nacirema. Boston. Little, Brown & Company

Kegley, Charles W. et.al. 1987. American foreign policy: Pattern and Process. New York. St. Martin's Press

Kaplan, Abraham. 1958. American ethics and Public Policy. New York, Oxford University Press

Gunter, Richard. 1998." Presidential, Parliamentary, Semi-Presidential System: Opening a Dialogue on Institutional Choice in Indonesia." Jakarta. LIPI & Ford Foundation

Linz. Juan J. 1998. " Some thoughts on Decentralization, Devolution, and many varieties of Democratic Federal arrangements". Jakarta. LIPI & Ford Foundation

Artikel :

"Kunjungan Menhankam Amerika", Kompas, 26 Juli 1998

" Indonesia menangis", Sinar Pagi, 14 Mei 1998

"Undang-Undang Dasar". 1983. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta,

